



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANDUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUS HARIYADI**
2. Jabatan : **HAKIM TINGGI**
3. NHK : **96648**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **1.269.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 243 m2/151 m2 di KOTA BEKASI ,
HASIL SENDIRI Rp. 449.000.000
2. Tanah Seluas 1770 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp.
182.000.000
3. Tanah Seluas 1730 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp.
178.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 420 m2/206 m2 di KOTA SALATIGA ,
WARISAN Rp. 460.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **377.500.000**

1. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp.
3.500.000
2. MOTOR, HONDA CS1 Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000
4. MOBIL, TOYOTA VIOS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
80.000.000
5. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
140.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **25.000.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **637.330.000**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**



| | | |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| Sub Total | Rp. | 2.308.830.000 |
| III. HUTANG | Rp. | ---- |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 2.308.830.000 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.